

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Norman Borlaug (1970) yang merupakan seorang ilmuwan pertanian berasal dari Amerika, ahli patologi tanaman, dan pemenang Hadiah Nobel untuk Perdamaian pada tahun 1970 mengatakan bahwa “*The first essential component of social justice is adequate food for all mankind. Food is the moral right of all who are born into this world*”. Kutipan tersebut merepresentasikan di mana makanan adalah sesuatu hal yang penting bagi kehidupan seluruh masyarakat dan merupakan kebutuhan dasar untuk keberlanjutan hidup. Apabila pangan tidak tersedia maka hal ini dapat mengancam kehidupan seseorang. Hal ini dapat dilihat pada era globalisasi saat ini, timbul permasalahan di ranah internasional yang semakin kompleks. Bahkan isu ketahanan pangan masih menjadi topik hangat di banyak negara. Sehingga isu krisis pangan telah menjadi perhatian banyak orang di seluruh dunia.

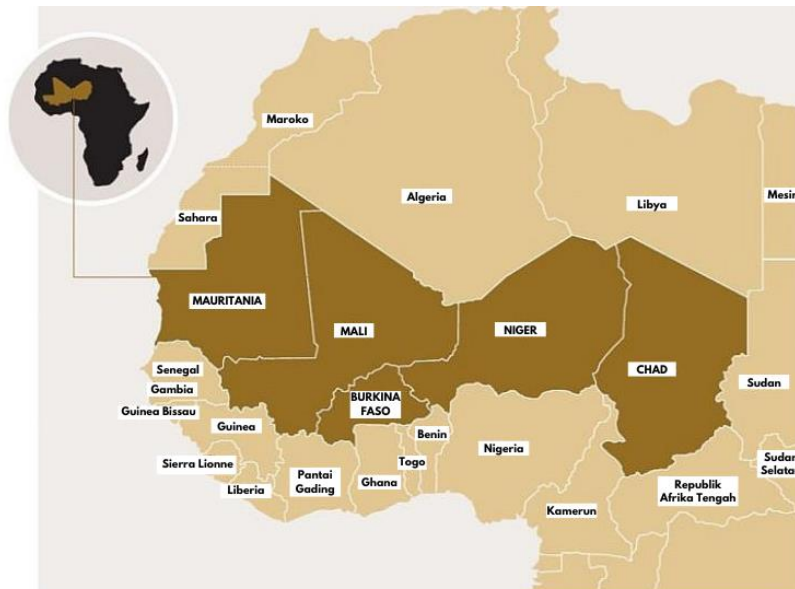
Krisis pangan adalah sebuah kondisi di mana tingkat kelaparan dan kekurangan gizi meningkat tajam di tingkat lokal, nasional, atau global (Timmer, 2010). Pada dasarnya, krisis pangan menyerupai dengan kelaparan. Kelaparan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan energinya karena masalah ketersediaan pangan.

Maka untuk mengatasi permasalahan ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk sebuah organisasi internasional yakni *Food and Agriculture Organization*

(FAO), di mana organisasi ini bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah yang berfokus pada pangan dan pertanian yang melanda berbagai negara di belahan dunia. FAO didirikan agar menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan memastikan semua orang memiliki akses untuk mendapatkan makanan yang berkualitas.

Fenomena krisis pangan masih terus terjadi di dunia dan salah satunya berada di wilayah Sahel. Nama Sahel berasal dari kata Arab “ساحل” sāhil, yang berarti “pantai”, namun umumnya dipahami sebagai zona semi-gurun dan sabana di Afrika sub-Sahara (Rnovec, 2020). Di sebelah utara wilayah Sahel, terdapat sahara yang merupakan lautan pasir yang tak berujung. Sedangkan di selatan wilayah Sahel, terdapat sabana hijau yang luas dan subur. Sahel merupakan kawasan yang terdiri dari Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, dan Chad (Suleiman, 2017).

Gambar 1.1 Peta Wilayah Sahel



Sumber : www.alliance-sahel.org (2020)

Wilayah Sahel merupakan lingkungan semi-kering yang dicirikan oleh iklim yang sangat bervariasi yakni dengan musim hujan yang intens di mana berpusat pada bulan Agustus dan tidak lebih dari 4 bulan, bahkan wilayah ini kerap terjadi musim kemarau yang berkepanjangan (Sartori & Fattibene, 2019). Wilayah Sahel sering terjadi kekeringan ditambah dengan pola cuaca yang tak terduga dan ekstrim. Hal ini berdampak kuat pada produktivitas pertanian yang merupakan faktor fundamental bagi keberlanjutan ekonomi dan hampir seluruh masyarakat bergantung pada kegiatan pertanian. Beberapa dampak tersebut juga berimbas pada ketahanan pangan di wilayah Sahel. Degradasi tanah dan erosi tanah, bersama dengan kurangnya ketersediaan air juga menyebabkan hilangnya hasil panen. Selain itu, kerusakan tanaman dan kematian ternak di wilayah Sahel juga semakin mengancam ketahanan pangan pada wilayah ini.

Gambar 1.2 Kondisi Tanah Wilayah Sahel



Sumber : *Center for International Forestry Research (CIFOR) (2019)*

Sahel adalah bagian dari Afrika sub-Sahara yang menghadapi beberapa masalah terbesar. Sahel merupakan rumah bagi sekitar 100 juta orang termiskin, paling tidak berdaya, dan terlupakan di dunia (United Nations Children's Fund, 2012). Hal inipun membuat organisasi untuk ikut turun tangan dan memberikan respons dalam menangani kekurangan pangan yang ada, salah satunya adalah *Food and Agriculture Organization* (FAO). Pada tahun 2013, setidaknya 10,3 juta orang mengalami kerawanan pangan dan gizi di wilayah Sahel. Bahkan usia anak di bawah lima tahun yang berjumlah lebih dari satu juta berisiko mengalami malnutrisi akut yang parah (FAO, 2013d). Hal ini terjadi dikarenakan akses yang terbatas ke makanan. Di sisi lain, buta huruf dan kemiskinan juga menyebar di antara para penggembala dan petani yang merupakan sebagian besar penduduk. Hal ini menyebabkan beberapa negara di Sahel juga menempati urutan terbawah Indeks Pembangunan Manusia (Cockburn, 2012).

Tahun 2014, krisis kelaparan semakin meluas sehingga lebih dari 25 juta orang mengalami rawan pangan (FAO, 2014g). Produksi pertanian rumah tangga pada tahun 2013 tidak cukup untuk memulihkan mata pencaharian mereka dan tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi mereka, sehingga hal ini membuat parah krisis kelaparan yang ada di Sahel. Bahkan pada tahun 2014, mereka harus menghadapi musim paceklik (gagal panen) dengan tingkat pasokan makanan yang rendah dan kemungkinan akan mengalami guncangan iklim, ekonomi, dan keamanan yang berulang (FAO, 2014c).

Kondisi Sahel pada awal tahun 2015 ditandai dengan munculnya *Ebola Virus Disease* (EVD) di Afrika Barat dan menyebar di beberapa negara Sahel. Virus ini dapat menyebabkan kematian. Selain itu, pada bulan Februari hingga Maret, lebih dari 1,2

juta orang membutuhkan bantuan untuk melindungi mata pencaharian mereka dan mencegah kekurangan gizi. Namun, angka ini akan mencapai 2,2 juta selama periode Juni hingga Agustus jika tindakan yang tepat tidak dilakukan (FAO, 2015d). Bahkan pada tahun 2015, musim paceklik pastoral berlanjut meskipun curah hujan membaik pada akhir Juli 2015 di zona pastoral dan mengakibatkan sejumlah ternak mengalami kematian (FAO, 2015e).

Untuk mengatasi krisis kelaparan yang terjadi, FAO telah mengembangkan kerangka kerja respons strategis (*FAO Strategic Resilience Framework*) yang berjudul “*Urgent Action to Support the Resilience of Vulnerable Populations*” untuk mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi krisis kelaparan di Sahel. Dalam kerangka kerja respons strategis, FAO berkomitmen kuat untuk mendukung kawasan Sahel. FAO menyadari perlunya untuk memutus lingkaran setan dari krisis dan keadaan darurat yang berulang di kawasan tersebut. Tujuan keseluruhan *FAO Strategic Resilience Framework* adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan maupun gizi masyarakat yang rentan di wilayah Sahel, memperkuat mata pencaharian mereka, memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan mengurangi dampak krisis di masa depan (FAO, 2013f).

FAO Strategic Resilience Framework juga sejalan dengan Tujuan Strategis 5 baru FAO yang bertujuan untuk "meningkatkan ketahanan mata pencaharian terhadap ancaman dan krisis" (FAO, 2014g). Hal ini membuat FAO merespon untuk memberikan strategi terhadap krisis Sahel yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa

dan mata pencaharian melalui dukungan produksi pertanian dan peternakan dari penggembala yang rentan, serta memulihkan aset produktif mereka (FAO, 2014c).

Sehingga pada tahun 2013, langkah awal FAO dalam membantu Sahel yakni dengan mengajukan total 23,2 juta USD untuk mendukung hampir 5 juta orang yang terkena krisis dan FAO juga memberikan bantuan darurat yang berfokus pada beberapa kegiatan (FAO, 2013b). Kontribusi yang dilakukan FAO yakni dengan mendistribusi benih tanaman untuk masyarakat di Sahel sehingga membuat para petani dapat melanjutkan produksi pertaniannya. Di samping itu, masih banyak tindakan yang dilakukan FAO demi meningkatkan ketahanan pangan di Sahel yang dibahas lebih detail dalam penelitian ini.

Dengan hadirnya FAO, pada tahun 2016, produksi gabah di Sahel diperkirakan mencapai 63,6 juta ton, meningkat 5 persen dibandingkan tahun 2015 dan 12 persen daripada rata-rata selama lima tahun terakhir. FAO memberikan dampak yang positif bagi wilayah Sahel. Hal ini dikarenakan FAO hadir dengan komitmen utama yakni untuk memberikan bantuan darurat bagi permasalahan yang terjadi di wilayah ini, terutama bantuan pangan (UN, 2016).

Periode antara Desember 2015 dan Januari 2016 melihat dimulainya kegiatan musim sekunder. Hal ini ditandai dengan penduduk di Sahel mulai menanam sayuran di semua area yang memungkinkan untuk memproduksi sayuran, ketersediaan sayuran (sayuran dan buah jeruk) yang tinggi tercatat di pasar. Selain itu juga tercatat dari adanya permintaan yang kuat dan penjualan yang sangat baik dari semua sayuran terutama bawang merah. Bahkan, penjualan hasil kebun pasar musim hujan (selada,

kubis, tomat, okra, lada) terus berlanjut. Secara keseluruhan, kondisi peternakan masih memungkinkan adanya pakan yang cukup untuk ternak (FAO, 2016e).

Dalam hal ini produksi pertanian di Sahel mengalami kemajuan yang bagus. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus pada tahun 2013-2015 dikarenakan pada tahun-tahun ini, Sahel sedang mengalami puncak dari krisis kelaparan. Selain itu, pentingnya akses yang memadai untuk memperoleh pangan yang bergizi menjadi penting tiap tahunnya. Maka upaya untuk mengatasi krisis kelaparan di wilayah Sahel sangatlah penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menekan angka kelaparan maupun kematian yang semakin meningkat. Apabila tidak ada dukungan, maka masyarakat harus hidup tanpa adanya stok makanan maupun nutrisi yang memadai.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana peran *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam meningkatkan ketahanan pangan pada saat terjadi krisis kelaparan di Sahel tahun 2013-2015?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis yakni untuk mengidentifikasi dan menggambarkan peran *Food and Agriculture Organization* (FAO) sebagai organisasi internasional dalam menangani masalah krisis kelaparan di Sahel pada tahun 2013-2015. Maka dari itu, penelitian ini sangat penting bagi penulis karena fakta membuktikan bahwa Sahel pada awalnya

menunjukkan banyak orang yang masih kelaparan karena produksi pertanian tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Namun dengan hadirnya FAO, perubahan yang cukup signifikan telah terjadi di Sahel.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan penelitian baik secara praktis maupun akademis yang diharapkan penulis, antara lain :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat memperdalam maupun memudahkan pemahaman pembaca mengenai apa saja peran *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam meningkatkan ketahanan pangan di Sahel pada saat terjadi krisis kelaparan tahun 2013-2015. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta referensi bagi para pembuat kebijakan ketika dihadapi oleh kasus kerawanan pangan di suatu wilayah tertentu.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi, pengetahuan, dan wawasan dalam kajian Hubungan Internasional tentang peran organisasi internasional *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam meningkatkan ketahanan pangan sebagai upaya untuk menangani situasi kerawanan pangan yang ada di wilayah sub-sahara Afrika seperti wilayah Sahel.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dibandingkan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu, yang mana dapat berguna untuk mempertajam penjelasan. Karya yang pertama adalah penelitian Nicolò Sartori & Daniele Fattibene (2019) dengan judul “*Human Security and Climate Change : Vulnerabilities in the Sahel*”. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Nicolò Sartori dan Daniele Fattibene dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan penelitian terletak pada pembahasan yang sama-sama menjelaskan bagaimana dampak regional dari perubahan iklim yang dikelompokkan dalam dimensi lingkungan dan ekonomi. Sedangkan perbedaannya terletak pada penulis yang menghadirkan FAO sebagai organisasi internasional yang berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan agar dapat menangani krisis kelaparan di Sahel.

Dalam penelitian Nicolò Sartori dan Daniele Fattibene lebih menjelaskan bagaimana dampak regional dari perubahan iklim pada berbagai komponen keamanan manusia dengan mengelompokkannya ke dalam tiga dimensi makro yakni dimensi lingkungan, ekonomi, dan kemanusiaan. Semua dimensi ini terhubung satu sama lain dan membutuhkan respons yang menyeluruh dan dalam jangka waktu yang panjang.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kombinasi siklus iklim alami dan perubahan iklim akibat ulah manusia membuat situasi semakin kritis. Sederhananya, kenaikan suhu maupun cuaca yang ekstrim di wilayah Sahel dapat membahayakan manusia, menyebabkan hilangnya hasil panen, kerusakan tanaman hingga kematian ternak di seluruh Sahel, dan hal tersebut mengancam mata pencaharian masyarakat di

Sahel. Sedangkan dalam dimensi ekonomi disebutkan bahwa Sahel merupakan salah satu wilayah termiskin di dunia. Perekonomian di Sahel didasarkan pada sektor pertanian, namun pada sektor ini masih banyak mengalami ketertinggalan bahkan sektor ini makin memburuk di bawah pola perubahan iklim. Dalam dimensi kemanusiaan, banyaknya permusuhan atau konflik yang meningkat juga memperburuk situasi kemanusiaan di wilayah Sahel. Oleh karena itu, dari ketiga latar belakang tersebut, kelaparan menjadi salah satu tantangan utama yang meningkatkan kerentanan dan ketidakstabilan Sahel.

Sedangkan karya yang kedua ialah penelitian Nakia Pearson & Camille Niaufre (2013) dengan judul “*Desertification and Drought Related Migrations in the Sahel – The Cases of Mali and Burkina Faso*”. Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian Nakia Pearson dan Camille Niaufre dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan pada penelitian terletak di bagian pembahasan yang sama dalam menjelaskan curah hujan yang tinggi, penggundulan hutan, pembakaran hutan, dan adanya penanaman yang berlebihan mengakibatkan kesuburan tanah menjadi buruk, sehingga membuat masyarakat banyak gagal panen dan bermigrasi untuk mencari tanah yang lebih subur. Sedangkan perbedaannya terletak pada penulis yang lebih menjelaskan secara detail terkait tanggapan dan upaya yang dilakukan FAO sebagai organisasi internasional dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan ketahanan pangan di Sahel.

Penelitian milik Nakia Pearson dan Camille Niaufre lebih condong menjelaskan bagaimana pola mobilitas yang sudah menjadi bagian dari strategi kelangsungan hidup

tradisional di wilayah yang merugikan secara iklim, dipengaruhi oleh kekeringan berulang dan penggurunan yang sedang berlangsung. Penelitian tersebut juga menjelaskan kondisi iklim, lingkungan dan populasi di wilayah Sahel, dan menunjukkan seberapa dekat dampaknya terhadap migrasi terkait dengan masalah ketahanan pangan.

Mali dan Burkina Faso menjadi dua studi kasus pola migrasi yang disajikan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa curah hujan di Mali dan Burkina Faso terkonsentrasi pada bulan Mei-September. Pada bulan-bulan ini musim hujan terdiri dari banyak badai dengan intensitas tinggi, sebaliknya ketika suhu tinggi maka akan mempercepat laju penguapan. Mali dan Burkina Faso sering terjadi kekeringan intra-musiman. Walaupun begitu, siklus hujan tahunan semakin bervariasi karena curah hujan dapat menurun hanya di akhir musim kemarau daripada di awal. Hal ini berdampak pada Tanah di Afrika Barat yang memiliki kesuburan yang buruk dan memiliki nilai nutrisi yang terbatas.

Di samping itu, pengurangan kimiawi tanah juga dipicu oleh manusia yang sering melakukan penggundulan hutan, membakar hutan, dan adanya penanaman yang berlebihan sehingga membuat kualitas tanah menjadi buruk dan lebih mudah tersapu saat terjadi badai maupun hujan lebat yang terjadi di akhir musim hujan. Adanya kondisi tanah yang buruk mengakibatkan para petani untuk migrasi ke Timur dan Barat di mana tanahnya lebih subur. Selain itu, di bagian akhir penelitian juga dijelaskan kebijakan yang ada terkait dengan masalah migrasi dan lingkungan serta memberikan beberapa rekomendasi.

Karya yang ketiga ialah penelitian Moh. Rafiul Rahman (2017) dengan judul “Peran FAO (*Food and Agriculture Organization*) dalam Menangani Masalah Krisis Pangan di Republik Afrika Tengah 2014 - 2016”. Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian Moh. Rafiul Rahman dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaan pada kedua penelitian terletak pada pembahasan yang sama dalam penggunaan konsep organisasi internasional dalam menganalisis peran FAO. Sedangkan perbedaannya terletak pada isu yang dibahas pada kedua penelitian. Penelitian Moh. Rafiul Rahman membahas Peran FAO di Republik Afrika Tengah dalam menangani krisis pangan tahun 2014-2016, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada peran FAO di Sahel dalam meningkatkan ketahanan pangan sebagai upaya untuk menangani krisis kelaparan tahun 2013-2015.

Penelitian milik Moh. Rafiul Rahman lebih menjelaskan bagaimana peran FAO dalam memberikan bantuan kepada Republik Afrika Tengah pada bidang pertanian. Bantuan ini dilakukan untuk merehabilitasi pertanian dan ketahanan pangan di Republik Afrika Tengah. Dalam memberikan bantuan, FAO bekerja sama dengan pemerintah Republik Afrika Tengah untuk mengimplementasikan program bantuan guna mengatasi masalah krisis yang sedang terjadi.

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu memperkuat alasan penulis dalam mengambil topik penelitian sekaligus penelitian-penelitian terdahulu tersebut juga dapat menjadi referensi yang membantu penulis untuk mendeskripsikan peran FAO dalam meningkatkan ketahanan pangan di Sahel guna menangani krisis kelaparan tahun 2013-2015, sehingga penelitian yang dibuat oleh penulis akan berbeda dengan

penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ada. Dalam penelitian terdahulu, belum terdapat pembahasan secara spesifik mengenai keterlibatan suatu organisasi internasional dalam meningkatkan ketahanan pangan guna menangani krisis pangan di Sahel. Oleh karena itu, penulis membawakan sudut pandang baru dalam penelitian ini yakni dengan menghadirkan organisasi internasional yaitu FAO sebagai organisasi yang tugasnya berfokus pada pangan dan pertanian. Adanya pengaruh FAO memiliki peran untuk meningkatkan ketahanan pangan guna mengatasi krisis pangan di Sahel pada tahun 2013 sampai 2015.

Penelitian ini penting untuk dibahas karena makanan adalah hal yang semakin berharga di Sahel, dan akses ke pangan menjadi semakin penting setiap tahun. Upaya untuk mengatasi krisis kelaparan di wilayah Sahel ini sangatlah penting untuk dilakukan guna menekan angka kelaparan maupun kematian yang semakin meningkat. Apabila tidak ada dukungan, maka masyarakat harus hidup tanpa adanya stok makanan maupun nutrisi yang cukup.

Maka dari itu, salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan terlibatnya organisasi internasional yakni FAO. FAO merupakan organisasi yang berfokus pada bidang pangan dan pertanian. FAO sebagai organisasi internasional memiliki peran besar untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Sahel.

Adanya peran FAO dalam memberikan bantuan di wilayah Sahel memiliki potensi dan energi penting untuk membangun Sahel lebih baik. Oleh karena itu FAO bersama mitra maupun *stakeholders* membuat strategi dan langkah yang tepat untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Sahel guna mengatasi krisis kelaparan

yang sedang terjadi. Meningkatkan ketahanan pangan juga dapat mengurangi ketegangan dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih stabil. Oleh sebab itu, alasan tersebut memperkuat penulis untuk membuat penelitian ini.

Penulis menjadikan kerangka pemikiran teoritis sebagai alat analisa untuk memahami suatu fenomena yang akan diteliti. Maka dari itu, peran *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam meningkatkan ketahanan pangan sebagai upaya untuk menangani krisis kelaparan di Sahel tahun 2013-2015 dapat diteliti menggunakan dua pendekatan berbeda yakni pendekatan dengan teori realisme dan pendekatan dengan teori liberalisme. Namun sayangnya teori realisme memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan teori liberalisme, kelemahan tersebut adalah realisme pesimis tentang kemungkinan kerja sama internasional karena mereka percaya bahwa negara sangat memperhatikan posisi relatif mereka. Asumsi dasar realis cenderung berfokus pada keuntungan relatif (*relative gain*) (Burchil, 2005; Brown & Ainley, 2005; Baldwin, 1993; Lamy, 2001). Sederhananya, realis tidak percaya bahwa organisasi internasional diciptakan untuk mencapai perdamaian dan keamanan, karena mereka dibentuk atas dasar perhitungan kepentingan pribadi (Baylis, 2001; Meierhenrich, 2012; Nathan, 2010).

Di satu sisi, teori liberalisme memiliki keunggulan tersendiri karena teori ini memiliki asumsi dasar bahwa melalui adanya kerja sama yang dinaungi oleh organisasi internasional dapat menciptakan perdamaian dunia. Dalam hal ini, liberalisme institusional menekankan keberadaan rezim internasional. Sebuah aliran

pemikiran yang dikenal sebagai liberalisme institusional berfokus pada orientasi kerja sama internasional melalui naungan organisasi internasional (Rosyidin, 2020).

Aliran liberalisme berpandangan bahwa sistem dunia internasional benar-benar anarki dan setiap interaksi antar negara diwarnai kecurigaan. Singkatnya, kerja sama internasional itu sulit untuk dicapai. Namun demikian, liberalisme institusional optimis tentang hal ini. Menurut pendapat Robert Keohane (1982) dalam "*The Demand for International Regimes*", bahwa perantara internasional adalah penyelesaian yang dapat membantu memastikan terlaksananya kerja sama internasional dalam keadaan dunia yang anarki. Hal ini disebabkan pentingnya sebuah rezim internasional, yang digambarkan sebagai sistem aturan, prinsip, norma dan prosedur pembuat keputusan yang memperhitungkan harapan semua aktor yang terkait. Rezim itu sendiri berfungsi sebagai fasilitator dalam pembuatan perjanjian yang mana dalam hal ini bertujuan sebagai usaha menjaga kondisi politiknya tidak mengarah pada perang ataupun pertikaian. Akibatnya, rezim internasional atau institusi yang dalam hal ini adalah organisasi internasional dapat mendorong berkembangnya kerja sama di antara aktor-aktor terkait.

Selain itu, Robert Keohane (1988) dalam tulisannya "*International Institutions: Two Approaches*" merasa optimis tentang relevansi mengenai organisasi internasional. Ia menyatakan bahwa organisasi internasional mampu memfasilitasi kerjasama, dan tanpa mereka "prospek spesies kita akan sangat buruk". Sederhananya, organisasi internasional sangat penting dalam memfasilitasi kerja sama antar negara dan menjaga perdamaian dan keamanan. Selain itu, kerja sama tidak akan terjadi dan

organisasi internasional yang memfasilitasi tidak akan tumbuh, apabila negara tidak melihat manfaat dari kerja sama tersebut (Keohane & Martin, 1995). Dikarenakan, organisasi internasional merupakan suatu wadah bagi negara yang memberikan kemudahan, terutama dalam hal koordinasi antar negara menjadi mudah dengan adanya organisasi internasional.

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, apabila dilihat dari dua paradigma tersebut yakni realis dan liberalis, penulis mengambil pilihan liberalis karena paling berkesesuaian dengan topik penelitian yang dilakukan penulis. Hal ini dikarenakan dengan kehadiran FAO, negara-negara anggota maupun non-anggota dapat saling mendukung di bawah payung FAO. Sehingga hal ini mempermudah koordinasi antar aktor untuk menciptakan ketahanan pangan yang ada di Sahel. Selain itu, rezim atau instansi yang dalam hal ini FAO sebagai organisasi internasional menjadi fasilitator dalam pembuatan perjanjian dan hal ini juga bertujuan sebagai usaha menjaga kondisi politiknya agar tidak mengarah pada perang ataupun pertikaian sehingga dapat tercapai perdamaian dan keamanan.

Di samping itu, suatu organisasi internasional diakui berhasil dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi suatu negara. Maka dari itu, keberadaan organisasi internasional berperan penting dalam menjawab isu maupun persoalan global yang tengah terjadi di dunia internasional saat ini. Organisasi internasional setidaknya mencakup tiga negara bagian atau lebih sebagai anggota, yang memiliki kegiatan di beberapa negara bagian, dan juga memiliki kantor pusat, kepala eksekutif, birokrasi, dan anggaran (Karns et al., 2015). Tujuan organisasi

internasional adalah mengkoordinasi aktivitas dengan metode pengorganisasian di mana merutinkan koordinasi dengan teknik-teknik seperti pembagian kerja dan spesialisasi tugas (Haas, 1965).

Menurut Biddle & Biddle (1966), adapun peran organisasi dalam membantu pihak lain dapat dibedakan sebagai berikut:

“(1) sebagai perantara, yang mana dalam hal ini berarti organisasi menjadi pihak yang menghimpun dana, sumber daya, dan upaya serta keterampilan yang ditujukan untuk masyarakat; (2) sebagai komunikator, yang mana dalam hal ini berarti organisasi memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab atas informasi tersebut.”

Namun, bila dilihat dari kaca mata hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan, organisasi internasional juga memainkan peran penting. Peran yang dimaksud yakni organisasi internasional memiliki tanggung jawab dalam mengidentifikasi dan menangani masalah yang berkaitan dengan peristiwa sosial yang tengah terjadi di masyarakat, serta menggalakkan dan mengakui adanya hak asasi manusia pada setiap individu (Barkin, 2006).

Menurut liberalisme, hak asasi manusia bersifat universal dan tersedia untuk setiap individu tanpa memandang kasta, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia merupakan hak-hak yang tersedia bagi setiap individu berdasarkan kemanusiaan, oleh karena itu hak tersebut bersifat universal dan hak ini melekat pada individu (Singh, 2017).

Maka dari itu, dari waktu ke waktu baik perlindungan hak asasi manusia dan penyediaan bantuan kemanusiaan juga menjadi salah satu peran dari organisasi

internasional. Di samping itu, peran dari organisasi internasional juga dapat memberikan efek yang cukup signifikan terhadap penerapan hak asasi manusia. Organisasi juga dapat efektif dalam membantu mengubah cara kerja politik internasional dalam jangka panjang (Barkin, 2006). Hak asasi manusia yang berkaitan dengan topik yang diambil penulis yakni hak atas pangan di mana semua manusia berhak untuk hidup bermartabat, bebas dari kelaparan, kerawanan pangan dan kekurangan gizi.

Selain itu, dalam organisasi internasional terdapat ide mengenai keamanan manusia. Dapat dikatakan bahwa berakhirnya Perang Dingin telah menciptakan peluang bahwa konsep keamanan akan diperluas, didefinisikan ulang, atau disusun kembali. Di era itu, definisi keamanan sebagai “tidak adanya ancaman eksistensial terhadap satu negara yang berasal dari negara lain” telah dikritik dengan berbagai alasan. Salah satu kritik tersebut yakni negara tidak lagi menjadi satu-satunya subjek keamanan. Kelompok sosial, etnis, agama minoritas, individu atau umat manusia telah dianggap sebagai objek yang memiliki kebutuhan keamanan (Müller, 2013). Sederhananya konsep keamanan manusia disebut "*people centred*" atau berorientasi pada manusia (Gomez & Gasper, 2013).

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran



Sumber : Keohane (1982); Biddle & Biddle (1966)

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah proses menguraikan konsep penelitian menjadi beberapa bagian agar dapat memudahkan pemahaman dan pengukuran. Setiap konsep harus diberi definisi operasionalnya, yang berarti menguraikan konsep menjadi bagian atau dimensi yang lebih spesifik agar dapat diukur. Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan, adapun indikator konsep organisasi internasional yang perlu di operasionalisasikan yakni konsep peran, hak asasi manusia, dan keamanan manusia.

1.6.1 Konsep Peran

Konsep peran mengacu pada perbuatan atau tingkah laku yang diharapkan dari seseorang, organisasi, atau kelompok yang memegang posisi tertentu, baik dalam organisasi atau dalam sikap negara (Mas'ood, 1989). Sederhananya, konsep peran dapat ditemukan dalam definisi yang dikemukakan oleh para pembuat kebijakan atas bentuk-bentuk umum, keputusan, norma ataupun aturan, dan fungsi negara secara luas dalam berbagai bidang baik nasional maupun internasional.

Konsep peran menjadi indikator pendukung dalam penelitian yang dilakukan penulis di mana dikaitkan dengan peran FAO sebagai organisasi internasional yang berfokus pada penanganan krisis kelaparan. Ketahanan pangan, gizi, dan produktivitas pertanian yang buruk; cuaca yang ekstrem; kondisi tanah yang buruk; hingga adanya virus ebola yang melanda Sahel telah menjadi faktor pendorong terjadinya krisis kelaparan pada tahun 2013-2015 yang harus ditangani. Maka dari itu FAO sebagai organisasi memegang peran seperti yang disebutkan William W. Biddle dan Loureide J. Biddle dalam menangani masalah tersebut.

Penulis mendeskripsikan berdasarkan peran organisasi yang disebutkan oleh William W. Biddle dan Loureide J. Biddle, FAO adalah organisasi internasional yang bertindak sebagai perantara. Dalam hal ini, FAO sebagai organisasi internasional berusaha untuk mengumpulkan dana guna memfasilitasi, melindungi, dan berupaya meningkatkan ketahanan pangan dalam menangani krisis kelaparan di Sahel.

FAO yang berperan sebagai Organisasi Internasional juga mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga negara untuk upaya mengatasi krisis pangan di Sahel

contohnya dengan *French Facility for Global Environment* atau FFEM. Sebagai bagian dari kemitraan baru, FAO dan FFEM bekerja sama untuk meningkatkan keadaan sumber daya alam di lahan basah Sahel Afrika, khususnya pengelolaan berkelanjutan burung air bermigrasi, yang sangat penting untuk ketahanan pangan penduduk lokal di wilayah Sahel.

FFEM dibentuk pada tahun 1994 dan telah bekerja untuk mempromosikan perlindungan lingkungan global di negara-negara berkembang dengan mendanai proyek bersama di bidang keanekaragaman hayati, perubahan iklim, degradasi lahan, penggurunan, dan polutan organik yang persisten. Proyek ini telah menerima dana dari Bank Dunia dan Uni Eropa. Sejak 2011, FFEM dan FAO telah berkolaborasi dalam berbagai proyek. Secara kolektif, mereka akan berusaha untuk memperluas peluang kerja sama dalam berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan kehutanan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim, terutama dalam kerangka Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP 22) (FAO, 2016b).

Dengan menggunakan metodologi sensus burung dan survei dan pemantauan, serta upaya peningkatan kapasitas, FAO, FFEM, dan mitra proyek lainnya akan bekerja untuk mempromosikan pengelolaan burung air migrasi yang berkelanjutan. Temuan ini akan membantu dalam pengembangan atau adaptasi kerangka legislatif dan peraturan, serta promosi kebijakan yang ditargetkan untuk mempromosikan perburuan berkelanjutan dan konservasi burung secara umum (FFEM, 2019). Kebijakan ini akan diintegrasikan ke dalam keseluruhan pengelolaan situs lahan basah. Upaya untuk meningkatkan pengelolaan burung air, yang mencakup perlindungan habitat alami,

berupaya memberikan manfaat baik bagi ekosistem maupun masyarakat lokal yang bergantung padanya untuk makanan dan sumber daya lainnya, termasuk pendapatan, untuk memaksimalkan manfaat bagi keduanya. FAO akan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan koordinasi proyek, yang akan dilakukan dengan kerja sama yang erat dengan semua mitra teknis proyek serta FFEM di Sahel.

Hal ini juga berarti bahwa FAO juga memiliki peran sebagai komunikator di mana FAO juga memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab atas informasi tersebut. Sederhananya adalah FAO menyediakan pemangku kepentingan dengan informasi yang relevan mengenai perkembangan program yang dilakukan dan memberikan ruang bagi pemangku kepentingan untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, informasi maupun data juga dapat digunakan oleh mitra yang bekerja dengan FAO sebagai bahan referensi sebelum memberikan bantuan.

Jadi kasus di Sahel dalam penelitian ini, FAO sebagai organisasi internasional dideskripsikan berdasarkan peran organisasi yang disebutkan William W. Biddle dan Loureide J. Biddle yakni berperan sebagai perantara dan komunikator.

1.6.2 Hak Asasi Manusia

Menurut OHCHR (2016), hak asasi manusia dimaknai sebagai “*Rights that every human being has by virtue of his or her human dignity*”. Singkatnya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap diri individu. Hak asasi manusia bersifat universal karena didasarkan pada martabat setiap manusia, tanpa memandang ras, jenis kelamin,

etnis, agama, bahasa, kebangsaan, usia, orientasi seksual, kecacatan, atau karakteristik pembeda lainnya. Hal ini dikarenakan setiap individu diterima oleh semua negara dan bangsa, diperlakukan sama dan tanpa membedakan setiap orang.

Hal ini juga sesuai dengan pandangan liberalis di mana hak asasi manusia bersifat universal dan tersedia untuk setiap individu tanpa memandang kasta, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan 'Hak Asasi Manusia' menurut definisi adalah hak-hak yang tersedia bagi setiap individu berdasarkan kemanusiaan, oleh karena itu hak itu bersifat universal. Liberal juga berpendapat bahwa hak melekat pada individu (Singh, 2017).

Daerah di Sahel tetap sangat terpengaruh oleh konflik dan ketidakamanan. Selain itu, musim kemarau dan banjir yang berulang berdampak negatif pada mata pencaharian para penggembala, petani, dan penduduk perkotaan. Tindakan pencegahan masalah tersebut membatasi peluang mata pencaharian di daerah pedesaan, seperti akses ke tanah, air, dan pasar oleh penggembala, petani, dan nelayan. Banjir dan wabah hama lebih lanjut menggerogoti produksi pangan di beberapa daerah. Akibatnya, kerawanan pangan akut tingkat tinggi mempengaruhi seluruh masyarakat Sahel.

Di Sahel, kerawanan dapat semakin memburuk di tahun berikutnya, yang menyebabkan pengungsian dan kerawanan pangan. Selain itu, selama beberapa bulan mendatang, para penggembala Sahel akan menghadapi tantangan mobilitas domestik dan lintas batas selama puncak *transhumance*, karena masalah keamanan. Bagi petani, tantangan akan berkisar pada akses ke lahan dalam persiapan untuk musim pertanian, dengan ketidakamanan membatasi akses sebagian besar di daerah perbatasan. Hal ini

tentu saja membuat orang-orang tidak aman pangan, terutama selama musim paceklik. Fenomena ini juga menyebabkan pengungsian yang dilakukan penduduk di wilayah Sahel sehingga menjadi perhatian (FAO, 2013c).

Apabila dilihat dari sisi hak asasi manusia, krisis kelaparan yang ada di Sahel juga menyangkut hak asasi manusia karena krisis tersebut mengancam kehidupan masyarakat di Sahel karena kurangnya pasokan makanan sehingga kelaparan dan kekurangan gizi menjadi merajalela. Hal ini menyebabkan banyak orang yang kehilangan nyawa akibat dari kelaparan. Sehingga hadirnya organisasi internasional seperti FAO juga berkontribusi dalam memenuhi hak asasi manusia agar hak atas pangan di Sahel dapat tercapai atau terpenuhi.

Perlu diketahui bahwa hak asasi manusia atas pangan diakui dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia: “Setiap orang berhak atas taraf hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas sandang, pangan dan papan; perumahan dan perawatan kesehatan dan pelayanan sosial yang diperlukan; dan hak atas jaminan pada saat menganggur, sakit, cacat, menajanda, hari tua atau kekurangan mata pencaharian lainnya dalam keadaan di luar kendalinya” (UN General Assembly, 1948).

Untuk mencapai hak tersebut, upaya yang dilakukan FAO yakni salah satunya dengan mengkoordinasikan dan memantau bantuan kemanusiaan di berbagai bidang, termasuk pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakan adalah sumber ekonomi utama masyarakat Sahel. Upaya koordinasi FAO ditujukan untuk memastikan program bantuan dan kerja sama yang ada berjalan dengan lancar dan efisien. Akibatnya, FAO

juga harus mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi terkini yang tersedia tentang ketahanan pangan, nutrisi, dan sumber daya alam di Sahel. Selain itu, FAO memberikan bantuan darurat yang ditujukan untuk pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan bencana alam serta akibat konflik.

1.6.3 Konsep Keamanan Manusia

Sejak akhir Perang Dingin, subjek studi keamanan telah mengalami “pelebaran” dan “pendalaman.” Aspek “pelebaran” keamanan telah mencakup pertimbangan ancaman keamanan non-militer, seperti kelangkaan dan degradasi lingkungan, penyebaran penyakit, kelebihan penduduk, migrasi, pergerakan pengungsi massal, nasionalisme, krisis ekonomi dan keuangan. Aspek “pendalaman” keamanan mencakup pertimbangan keamanan individu dan kelompok, daripada berfokus secara sempit pada ancaman eksternal terhadap negara (Paris, 2001).

Dalam kerangka tersebut, “keamanan manusia” mengandung keamanan bersama, keamanan global, keamanan kooperatif, dan keamanan komprehensif. Pembahasan konsep ini mendorong para pembuat kebijakan dan sarjana untuk berpikir tentang keamanan internasional sebagai sesuatu yang lebih dari pertahanan militer atas kepentingan dan wilayah negara.

Maka dari itu, dalam pengertian tersebut, konsep “keamanan manusia” menganggap manusia sebagai objek keamanan serta menempatkan ancaman terhadap manusia dalam agenda. Seperti yang dapat dipahami dari bentuk pemahaman liberal,

keamanan sebagai konsep dasar yang diterapkan dalam analisis kebijakan melalui penempatan beberapa dimensi (Aras, 2019).

Tabel 1.1 Keamanan sebagai Konsep Dasar dalam Beberapa Dimensi

	Bentuk Keamanan	Fokus	Hal yang Berisiko	Ancaman terhadap Keamanan
Liberal	Manusia	Individu, manusia, hak asasi manusia	Kelangsungan hidup, pengembangan manusia, dan pemerintahan	Negara itu sendiri, bencana alam dan perubahan

Sumber : P. H Liotta (2002)

Dari tabel tersebut, dapat ditarik benang merah bahwasanya keamanan manusia adalah tentang keamanan untuk rakyat daripada negara (Acharya, 2014). Keamanan mencakup perlindungan terhadap kehidupan manusia disamping permasalahan yang menyangkut senjata dan konflik. Maka karakteristik dari konsep keamanan manusia adalah "*people centred*" (Gomez & Gasper, 2013). Selain itu, peran aktor non-negara telah diakui sebagai agen untuk menjamin keamanan. Pentingnya keamanan telah bergeser dari konflik militer dan bersenjata menjadi berfokus pada individu.

Di samping itu, melalui globalisasi, kebutuhan masyarakat akan keamanan melampaui wilayah tradisional integritas teritorial dan meluas ke masalah transnasional, dari kejahatan terorganisir hingga migrasi, yang semuanya mengarah pada tuntutan untuk peningkatan keamanan. Selain itu, bantuan dari aktor non-negara

akan lebih dipertimbangkan apabila bantuan tersebut menawarkan cara yang lebih efektif daripada cara negara tersebut punya. Hal tersebut didasarkan pada komitmen normatif untuk "keamanan manusia" dengan individu sebagai subjek dari hak atas keamanan (Müller, 2013).

Meskipun "keamanan manusia" diperlakukan sebagai konsep yang diperdebatkan, perumusan awal dilakukan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dengan diterbitkannya *Human Development Report* tahun 1994. Berdasar laporan tersebut, potensi ancaman terhadap Keamanan Manusia dapat diklasifikasikan dalam tujuh kategori utama: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan masyarakat, dan keamanan politik (UNDP, 1994).

Dalam hal ini, penelitian penulis lebih condong kepada keamanan manusia dalam kategori pangan. Menurut FAO, krisis pangan Sahel telah memperparah penderitaan mayoritas penduduk Sahel dengan menyebabkan kelaparan dan kekurangan gizi. Hal ini disebabkan curah hujan yang terbatas di negara itu telah mengakibatkan gagal panen, bencana alam seperti banjir maupun kekeringan, wabah penyakit, dan terbatasnya akses sebagian warga Sahel untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan mereka, dan meningkatnya konflik bersenjata. Bahkan dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, Sahel menjadi salah satu negara dengan tingkat malnutrisi tertinggi (Jefferys, 2013).

Ketahanan pangan berarti bahwa semua orang setiap saat memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan pokok. Hal ini mensyaratkan bahwa masyarakat

memiliki akses yang siap untuk pangan—bahwa mereka memiliki “hak” atas pangan, dengan menanamnya sendiri, dengan membelinya ataupun dengan memanfaatkan sistem distribusi pangan publik. Selain itu, ketidakamanan pangan ini disebabkan oleh kelaparan maupun kenaikan harga secara tiba-tiba (UNDP, 1994).

Selain itu, definisi ketahanan pangan yang diterima secara luas saat ini berasal dari laporan tahunan FAO mengenai ketahanan pangan "*The State of Food Insecurity in the World 2001*": Ketahanan pangan adalah situasi yang ada ketika setiap orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi yang memenuhi kebutuhan pangan dan pilihan pangannya untuk hidup aktif dan sehat (FAO, 2002). Adapun empat dimensi ketahanan pangan yang telah diidentifikasi sesuai dengan definisi (FAO, 2008). Pertama, tersedianya pangan yang diproduksi dalam negeri dan impor dari luar negeri. Kedua adalah aksesibilitas, di mana pangan dapat diakses semua masyarakat. Ketiga adalah pemanfaatan, di mana individu harus dapat makan dalam jumlah yang cukup baik kuantitas maupun kualitas agar dapat hidup sehat dan utuh untuk mewujudkan potensi dirinya. Makanan dan air harus aman dan bersih, dengan demikian air dan sanitasi yang memadai juga terlibat pada tingkat ini. Keempat adalah stabilitas, yang mana berkaitan dengan kemampuan masyarakat atau rumah untuk menahan guncangan pada sistem rantai makanan baik yang disebabkan oleh bencana alam atau yang disebabkan oleh manusia. Dengan demikian, dari beberapa penjelasan yang telah dijabarkan, konsep keamanan manusia dianggap relevan dalam membaca dan melakukan penelitian ini.

1.7 Argumen Penelitian

Argumen utama dalam penelitian ini adalah FAO memiliki peran untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Sahel dalam mengatasi krisis pangan yang terjadi pada tahun 2013-2015.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tipe penelitian kualitatif di mana penulis berusaha untuk mendeskripsikan peran *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam meningkatkan ketahanan pangan sebagai upaya untuk menangani krisis kelaparan di Sahel tahun 2013-2015. Penelitian kualitatif berkaitan dengan mengembangkan penjelasan fenomena sosial (Hancock et al., 2009). Sederhananya, penelitian kualitatif bermaksud untuk membantu dalam memahami dunia sosial tempat kita hidup dan mengapa segala sesuatunya seperti itu. Hal tersebut berkaitan dengan aspek sosial dunia kita dan berusaha menjawab pertanyaan tentang: (1) mengapa orang berperilaku seperti yang mereka lakukan, (2) bagaimana opini dan perilaku terbentuk, (3) bagaimana individu dipengaruhi oleh fenomena yang terjadi pada sekitar mereka, dan (4) bagaimana dan mengapa budaya dan praktik berkembang seperti yang mereka miliki (Hancock et al., 2009).

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan proses penyelesaian masalah yang diselidiki dengan cara menjelaskan situasi suatu subjek atau objek penelitian (orang, organisasi, komunitas

dan lain-lain) (Soekanto, 1986). Dalam penelitian ini, penulis mengambil subjek yakni FAO dan objek penelitian yakni wilayah Sahel. Sederhananya, penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi baik aktual dan faktual yang menjelaskan fenomena yang ada.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan suatu tempat di mana peneliti memahami keadaan sebenarnya dari sasaran penelitian guna memperoleh maupun menyatukan data atau informasi yang diperlukan dalam penelitian. Perlu diketahui bahwa penelitian ini menggunakan studi literatur dikarenakan yang diteliti hanya memerlukan dokumen-dokumen, jurnal, buku, maupun laporan-laporan. Maka dari itu, penulis sudah menganggap cukup tanpa harus melakukannya di lapangan karena semua dokumen-dokumen seperti: jurnal milik Cockburn dan Collier, buku milik Acharya dan Biddle & Biddle, maupun laporan-laporan milik FAO dan OCHA yang sudah tersedia sehingga penulis mengambil opsi tersebut.

1.8.3 Subjek Penelitian

Fokus utama dari subjek penelitian dalam tulisan ini adalah peran *Food and Agriculture Organization* (FAO) dalam meningkatkan ketahanan pangan di Sahel pada saat terjadi krisis kelaparan tahun 2013-2015.

1.8.4 Jenis Data

Penelitian kualitatif yang dilakukan penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh dari dokumen maupun laporan resmi yang

dikeluarkan oleh FAO. Sedangkan data sekunder akan diperoleh dari studi literatur seperti buku, jurnal, maupun media massa baik nasional dan internasional.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang dilakukan penulis didapatkan dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang menyerahkan data langsung untuk pengumpul data (Sugiyono, 2011). Sumber data primer dalam penelitian ini yakni data yang diambil dari laporan-laporan resmi yang dibuat oleh FAO.

Sedangkan, sumber data sekunder merupakan sumber yang menyerahkan datanya secara tidak langsung kepada pengumpul melalui orang lain maupun dokumen yang ditulis oleh orang lain (Sugiyono, 2011). Dalam hal ini sumber data sekunder yang dimaksud penulis adalah jurnal, buku, maupun surat kabar yang berkaitan dengan topik yang diangkat.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini yakni menggunakan studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan cara meninjau dan menginterpretasikan dokumen-dokumen, buku-buku, maupun sumber tertulis lainnya yang berkorelasi dengan pokok bahasan yang dibahas penulis. Sumber literatur yang digunakan penulis adalah literatur yang berhubungan dengan krisis kelaparan di Sahel, peran FAO dalam meningkatkan ketahanan pangan pada saat terjadi krisis kelaparan di Sahel, dokumen resmi atau arsip

yang berhubungan dengan topik penelitian yang diangkat penulis, serta surat kabar *online*.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Mengidentifikasi dan mencari pola umum hubungan dalam pengelompokan data yang menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan dikenal sebagai analisis data kualitatif (Marshall & Rossman, 2006). Teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan penulis adalah metode kongruen, yang mana penulis akan mencari kesesuaian antara data yang digunakan dalam penelitian dengan teori atau konsep yang digunakan. Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan konsep organisasi internasional, dan menggunakan operasionalisasi konsep yakni konsep peran, hak asasi manusia, dan konsep keamanan manusia dalam menyusun topik penelitian.

1.8.8 Kualitas Data

Data yang didapat dari penelitian ini merupakan himpunan data berkualitas yang dibuktikan dengan sumber kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai penelitian yang menggunakan sumber data primer dan sekunder, penulis berkomitmen dalam menjaga integritas data yang berasal dari laporan resmi, maupun dari jurnal, buku, dan surat kabar.